

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah terkait dengan komitmen di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sudah sangat siap. hal ini dibuktikan dengan secara konsistennya kepala dinas kesehatan dalam hal ini sebagai pimpinan puncak untuk selalu mendukung penuh dalam penerapan basis akrual tersebut, Selain itu komitmen terhadap penerapan basis akrual juga di dukung penuh oleh loyalitas dan partisipasi pegawai pada bagian keuangan dinas kesehatan Provinsi Gorontalo.
2. Kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual untuk kualitas sumber daya manusia di dinas kesehatan Provinsi Gorontalo kurang siap berkaitan dengan tingkat pemahaman pegawai, hal ini karena sebagian pegawai yang ada di dinas kesehatan Provinsi Gorontalo belum terlalu memahami basis akrual, adapun yang sudah memahami namun masih sebatas teori sedangkan untuk praktek masih membutuhkan waktu untuk lebih menggali tingkat pemahaman dalam mempraktekkan basis akrual selain itu masih kurangnya pegawai yang ada dalam bagian keuangan dinas kesehatan Provinsi Gorontalo sehingga mengakibatkan implementasi basis akrual tidak fokus dalam implementasiannya.

3. Kesiapan penerapan basis akrual terkait dengan infrastruktur sudah cukup siap karena dukungan infrastruktur dalam penerapan basis akrual sudah cukup menunjang, hal ini terlihat dengan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi sesuai dengan fungsinya. Selain itu untuk dukungan anggaran selalu dimaksimalkan dengan baik hal ini karena di dinas kesehatan Provinsi Gorontalo untuk perangkat keras dan perangkat lunak selalu dilakukan pemeliharaan agar tidak cepat rusak adapun kalau sudah rusak maka segera dianggarkan untuk diperbaiki sesuai dengan fungsinya.
4. Kesiapan penerapan basis akrual untuk indikator penilaian sistem informasi sudah cukup siap hal ini karena penerapan basis akrual memiliki berbagai macam permasalahan misalnya jaringannya yang tidak stabil dalam melakukan pengimputan data keuangan di Sistem informasi manajemen daerah hal ini karena pengaruh cuaca yang memungkinkan jaringan *Local Area Network* (LAN) sering terganggu.

5.2. Saran

Saran ataupun rekomendasi yang diajukan oleh peneliti terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah basis akrual pada dinas kesehatan provinsi gorontalo yaitu:

1. Penerapan basis akrual di dinas kesehatan Provinsi Gorontalo memiliki berbagai macam kendala terkait tingkat pemahaman pegawai, oleh karena itu sebaiknya dilakukan pengembangan terkait dengan pemahaman para pegawai dibagian keuangan dinas

kesehatan Provinsi Gorontalo akan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual misalnya dengan sosialisasi ataupun pelatihan akan penerapan standar akuntansi pemerintah tersebut secara terus menerus dan bukan hanya pada saat awal penerapan basis akrual. Tujuannya yaitu agar tingkat pemahaman pegawai terhadap basis akrual dapat di ingat oleh pegawai dalam jangka waktu yang lama sehingga penerapan basis akrual dapat berjalan dengan baik.

2. Penerapan basis akrual bukan hanya berlandaskan pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 namun penerapan basis akrual khususnya di Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo juga didukung dengan berbagai macam regulasi perundang-undangan seperti Peraturan Gubernur nomor 90 tahun 2014 tentang pedoman penatausahaan persediaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Peraturan Gubernur nomor 82 tahun 2014 tentang bagan akun standar Pemerintah Provinsi, dan Peraturan Gubernur nomor 39 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi pemerintah Provinsi Gorontalo. Sehingga agar tidak terjadinya tumpang tindih ataupun ketidakjelasan dalam sinkronisasi peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dan Peraturan Gubernur yang ada di Provinsi Gorontalo maka sebaiknya dilakukan kajian mendalam terkait dengan penerapan sistem serta kebijakan akuntansi yang akan diterapkan dalam Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual agar tidak mengalami kendala saat penerapannya.

5.3. Keterbatasan penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Jawaban dari sebagian narasumber yang belum dapat menjelaskan keseluruhan dari pertanyaan yang diberikan oleh peneliti serta waktu wawancara untuk setiap narasumber yang tidak sama hal ini karena peneliti tidak mau mengganggu waktu kerja dari para pegawai tersebut.
2. Data pendukung penelitian berupa dokumentasi yang belum dapat menjelaskan terkait dengan proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2008. Basis Akuntansi Pemerintahan . (Online) ,[http : // syukriy wordpress.com/2008/06/28/basis-akuntansi-pemerintahan/](http://syukriy.wordpress.com/2008/06/28/basis-akuntansi-pemerintahan/). (Di akses tanggal 8 januari 2016)
- Asfiansyah, Ahdony. 2015. *Strategi Implementasi akuntansi akrual pada pemerintah daerah (Studi kasus pada pemerintah Kota S)*, Jurnal NeO-Bis Volume 9, No. 1,
- Bahar, Rafika. 2014. *Implementasi akuntansi berbasis akrual: mampukah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan? Studi kasus pada pemerintah kota semarang*: Semarang:Skripsi.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2014. *Audit Sektor Publik Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group.
- _____. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- _____. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Indeks.
- Dora, Sofia. 2014. *Analisis kesiapan pemerintahan dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Studi kasus pada BPKP kota Medan)*, Medan: Skripsi.
- Faradilah, Andi. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan (peraturan pemerintah No 71 tahun 2010)*, Makassar: Skripsi.
- Grigg, Neil, & Fontane G. Darrel, 2000. *Infrastructure System Management & Optimization*. Internasional Seminar "Paradigm & Strategy of Infrastructure Management" Civil Engineering Departement Diponegoro University.
- Hasibuan, S.P. Malayu. 2002. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Hiltebeitel, Kenneth N. 1992. *A look at the modified cash basis*. The CPA Journal.
- Krumwiede K. 1998. *The implementation stages of activity-based costing and the impact of contextual and organizational factors*, Journal of Management. Accounting Research.
- Kusuma, Ririz Setiawati. 2013. *Analisis kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (kasus pada pemerintah Kabupaten Jember)*.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
- Modul Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual. 2014. Kementerian keuangan Republik Indonesia
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mu'Am, Ahmad. 2011. *Basis akrual dalam akuntansi pemerintah di indonesia*, Tangerang Selatan: Mifaz Rasam Publishing.
- Sari, Dita P dan Putra, Hendrawan S. 2012. *Menelisik akuntansi pemerintah berbasis akrual*. JEAM Vol XI No. 2.
- Simanjuntak, Binsar H., 2010. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor Pemerintahan di Indonesia, Disampaikan Pada Kongres XI IAI.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Peraturan gubernur nomor 90 tahun 2014 tentang pedoman penatausahaan persediaan di lingkungan pemprov gorontalo.
- _____ nomor 82 tahun 2014 tentang bagan akun standar pemerintah provinsi
- _____ nomor 39 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi pemerintah provinsi gorontalo,
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan
- _____ Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan berbasis akrual
- Putra, Hendrawan S dan Kurrohman T. Analisis kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso), Jurnal Akuntansi Universitas Jember
- Putra, Darma I Wayan dan Ariyanto D. 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual : E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- _____ Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
- Yanti,Widya.2012. Analisis Perlakuan Dana Non Halal Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Studi Kasus Pada LAZ Yayasan Yatim Mandiri,LAZ Yayasan Rumah Zakat,LAZ Yayasan Dompot Dhuafa Jawa Timur), Seminar Skripsi tahun 2012 di Universitas Jember
- Widjajarso, Bambang. 2009. Penerapan Basis Akrual pada Akuntansi Pemerintah Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan. <http://Sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/akuntansiberbasis-akrual- pdf>. Diakses tanggal 29 januari 2016.